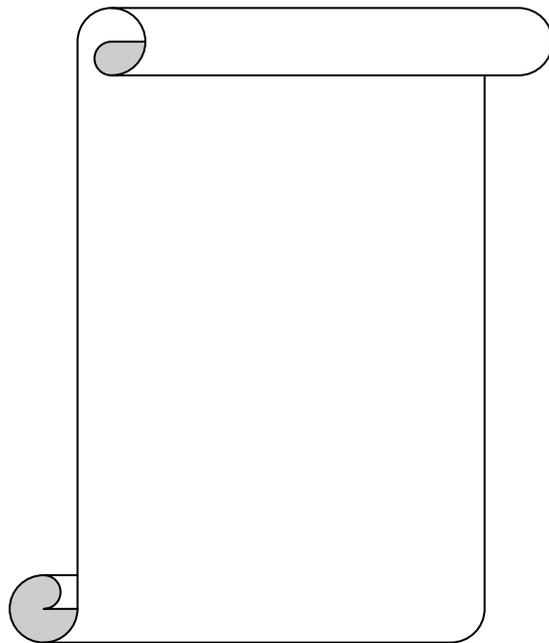


**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LKJ-IP)**



**KECAMATAN PITU RIAWA**  
**TAHUN 2018**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. LATAR BELAKANG

Seperti yang telah diungkapkan pada ikhtisar terdahulu bahwa pemerintah Kecamatan Pitu Riawa dengan ibu kota Dongi, merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kecamatan ini terletak di bagian paling utara yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dengan jarak sekitar  $\pm$  30 km dan dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan yang meliputi 10 Desa dan 2 Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 24.405 jiwa dan dengan luas sekitar 210,47 Km<sup>2</sup>.

Kecamatan ini terbentuk berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tanggal 6 Pebruari 1995 Nomor : 80/11/1995 yang merupakan hasil pemekarann dari kecamatan Dua PituE dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang
- Sebelah Timur : Kecamat Dua Pitue
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wajo
- Sebelah Barat : Kecamatan Sidenreng

Pelaksanaan kegiatan di satuan kerja Pemerintah Kecamatan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 ). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat Daerah atau instansi lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Camat menerima pelimpahan sebagai kewenangan pemerintah dari Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 39 tahun 2008 tentang tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan, diketahui bahwa tugas camat adalah memimpin Kecamatan dalam hal menyusun dan menetapkan Renstra serta Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan, membina dan mengkoordinasikan dengan Sekretaris Kecamatan dan para kepala seksi lingkup kecamatan ; mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan tersebut dengan instansi terkait serta melaksanaka urusan – urusan yang dilimpahkan oleh Bupati; melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaa tugas Dinas, serta membuat laporan secara berkala.

Dari rumusan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan kecamatan sebagai perangkat daerah dalam struktur pemerintah Kabupaten memegang peranan yang strategis dalam upaya mendekatkan pemerintah dan masyarakat. Hal ini didukung dengan Undang – Undang pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa camat memperoleh pelimpahan sebagai kewenangan pemerintah dari Bupati.

Ketentuan mengenai pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat menunjukkan bahwa Camat memiliki tugas-tugas operasional, sektoral sehingga camat mempunyai hak dan kewajiban melaksanakan tugas dan wewenan ini. Pengertian kecamatan sebagai wilayah kerja camat membawa konsekwensi camat memiliki tugas – tugas yang bersifat kewilayahan atau yang disebut dengan dengan tugas umum pemerintahan, dasampin tugas-tugas oprasional.

Ini berarti pula bahwa kecamatan akan menjadi kesatuan hukum yang memiliki kewenangan teritorial sekaligus kewenangan sektoral. Dengan demikian hubungan antara kabupaten dan kecamatan dapat dianalogikan hubungan pusat dengan daerah. Hanya yang dapat membedakan bahwa kecamatan bukanlah daerah otonom dan mempunyai hak menertibkan peraturan perundangan yang mengikat rakyat di wilayahnya. Oleh karena itu kecamatan memiliki kompotensi relative dan absolut, namun tidak memiliki hak regulasi yang mengikat.

Pendelegasian kewenangan bukan hanya memindahkan kewenangan yang dijelaskan secara langsung oleh Bupati kepada Camat, melainkan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi peberian pelayan kepada masyarakat serta penggunaan dana dan pasilitas publik untuk kepentingan public juga. Selain itu pendelegasian kewenangan tersebut harus dapat memenuhi dan meningkat rasa keadilan masyarakat termasuk didalamnya memperoleh akses pada fasilitas dan akses yang setara terutama untuk kelompok masyarakat yang selama ini. Pada sisi lain, pendelegasian kewenangan harus mampu menjadi pengungkit kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menjadi produktif. Dengan kata lain pendelegasian kewenangan jangan sampai memperpanjang jenjang birokrasi dan menciptakan ekonomi dengan biaya tinggi yang mambuat masyarakat menjadi tidak produktif.

Berbicara masalah kedisiplinan aparatur Kecamatan Pitu Riawa di tahun 2015 mengalami peningkatan karena pelaksanaan upacara tetap terlaksa, baik upacara hari senin, integrasi dan lain sebagainya begitu pula hari kemerdekaan RI tanggal 17 agustus yang dirayakan tiap tahun. Pelaksanaan upacara, apel pagi dan apel pulan tetap terlaksana seperti apa yang dilaksanakan di tahun – tahun sebelumnya, kesemuanya itu dapat terlaksana dengan melibatkan semua unit kerja yang ada di Kecamatan Pitu Riawa dengan maksud dan tujuan disamping sebagai peningkatan kedisiplinan juga menjalin hubungan koordinasi antara berbagai unit kerja.

## 2. SISTIMATIKA LAPORAN

Sistimatika pelaporan dalam organisasi Kantor Kecamatan Pitu Riawa dilaksanakan sesuai dengan permintaan data apapun yang dibutuhkan sesuai isi desposisi pimpinan ke seksi atau kasubag, baik data di Kantor Kecamatan Pitu Riawa maupun data dari Desa/Kelurahan. Akan tetapi dalam penyampaian laporan tersebut terdapat kenadala yang kami hadapi, yakni :

- Terlambatnya surat permintaan data sampai di Kantor Camat Pitu Riawa dan ditindak lanjuti sesegera mungkin.
- Data yang diminta dari Desa/Kelurahan lambat kita sampaikan akibat adanya beberapa desa yang jauh dari Kantor Camat Pitu Riawa.
- Desa yang ditujukan dalam permintaan data tersebut terkadang tidak diperhatikan oleh kepala Desa/Lurah sehingga data yang diminta mengalami keterlambatan dalam pengiriman data.
- Di Kantor Camat Pitu Riawa tidak ada petugas khusus yang mengantar surat ke Desa/Kelurahan begitu pula para unit kerja lingkup Kecamatan Pitu Riawa.
- Tidak semuanya permintaan data terlambat kami kirim karena jauh sebelumnya terkadang disampaikan secara lisan mendahului surat permintaan data tersebut.

Dilingkup Kantor Camat Pitu Riawa terkait penyampaian data/laporan tentunya dibebankan kepada seksi dan kasubag yang diharapkan secepat mungkin menyampaikan/mengirim data yang diminta dan bila mana seksi atau kasubag tidak ada, maka disampaikan kepada yang dianggap mampu menyelesaikan data/laporan tersebut. Berikut gambaran struktur organisasi Kantor Camat Pitu Riawa

### **a. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 ) yang merupakan penjabaran / tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 ), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Perencanaan Keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Trantib & Perlindungan Masyarakat
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok jabatan Fungsional

**b. Permasalahan Utama (Strategi issued)**

1. Untuk kantor Camat Pitu Riawa gedung kantor masih sangat dibutuhkan karena komposisi / jabatan eslon sekarang sudah terisi semua ditambah lagi adanya 1 unit kerja yang berkantor di kantor camat, yaitu UPT Dispenda yang sangat membutuhkan ruangan untuk keperluan mobile pengarsipan surat-surat penting dan juga pada waktu menjelang pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) juga sangat membutuhkan ruangan khusus.
2. Tidak adanya Mushallah
3. Tidak adanya saluran pembuangan (selokan) sehingga air tergenang pada waktu musim hujan
4. Kurangnya Staf
  - \* Kantor Camat Pitu Riawa sangat kekurangan staf sehingga untuk pengadministrasian dilakukan oleh pejabat eslon sendiri
5. Kurangnya Kendaraan Dinas
  - \* Untuk kendaraan Dinas pada kantor Camat Pitu Riawa masih kurang sehingga tugas-tugas luar tetap menggunakan kendaraan pribadi

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan tujuan strategik berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategik Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi pencapaian tujuan menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program. Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait dan ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Kemudian, kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam tiap tahun akan dijelaskan dalam Formulir Perjanjian Kinerja Tahunan (*Yearly Performance Agreement*). Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan kebijakan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, arahan, prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Elemen penting dalam memilih kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijaksanaan yang cocok.

Program pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi yang sekaligus merupakan penjabaran rinci tentang langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan termasuk didalamnya proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan.

Adapun Program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangu Desa.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik maka disusun suatu Perjanjian Kinerja Tahunan (*Yearly Performance Agreement*). Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran target kinerja yang akan dicapai dalam satu periode pelaksanaan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik

maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan dalam mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2018 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan Kantor Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat berjalan dengan baik.

#### **A. RENCANA STRATEGI**

Adapun yang ingin dicapai pada bab ini tidak terlepas apa yang telah dikemukakan terdahulu dengan mengungkapkan 2 poin yakni :

1. **Rencana Strategis** yang mengacu pada program Visi & Misi, Tujuan, Sasaran, serta kebijakan.

##### **Visi dan Misi.**

Bagi setiap Organisasi, baik organisasi public maupun organisasi priyat, harus memiliki visi yang ingin diwujudkan dalam waktu tertentu serta misi merupakan wahana dalam rangka mewujudkan visi yang dimaksud. Demikian juga halnya dengan Unit Satuan Kerja Pemerintah Kecamatan Pitu Riawa, dalam mengembang amanah dari Pemerintah Daerah dan masyarakat senantiasa menempatkan visi Unit Satuan Kerja Pemerintah Kecamatan Pitu Riawa sebagai pedoman yang harus dituju dan merumuskan misi sebagai kiat dan strategi dalam mewujudkan visi tersebut. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa visi bagi suatu organisasi seperti Unit Satuan Kerja Pemerintah Kecamatan Pitu Riawa adalah merupakan pandangan jauh ke depan tentang kearah mana akan dibawa, sedangkan misi adalah merupakan wahana dipergunakan dalam mewujudkan visi organisasi.

Adapun Visi Kecamatan Pitu Riawa, adalah “ ***Mewujudkan Aparatur yang Profesional Mandiri dan Religus.***”

Sedangkan Misi Kecamatan Pitu Riawa adalah :

1. Optimalisasi pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan
2. Melakukan koordinasai atas kegiatan instansi vertical dengan dinas daerah dan instansi vertical kecamatan
3. Melakukan pembinaan dalam rangka perencanaan pembangunan
4. Melakukan pembinaan kesejahteraan social kemasyarakatan meliputi pembinaan keagamaan, pendidikan keterampilan masyarakat, kesehatan masyarakat dan sarana social kemasyarakatan lainnya

5. Melakukan pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban dengan koordinasi aparat keamanan yang terkait dalam wilayah kecamatan
6. Mengembangkan sumber daya dan mendorong semangat profesionalisme serta peningkatan disiplin aparatur

#### Tujuan

Tujuan Kantor Camat Pitu Riawa adalah :

1. Memantapkan fungsi dan peran kantor camat Pitu riawa
2. Meningkatnya dan berkembangnya SDM
3. Memantapkan penyusunan perencanaan daerah
4. Menjadikan dokumen perencanaan sebagai penggerak dan pengendali pembangunan
5. Terciptanya mekanisme perencanaan yang mantap dan aspiratif
6. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan konsisten dan berkesinambungan
7. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
8. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

#### Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, maka sasaran yang dicapai adalah :

1. Melaksanakan tugas-tugas kantor camat pitu riawa sesuai dengan ketentuan dan jadwal waktu
2. Meningkatkan kinerja kantor camat pitu riawa yang didukung SDM yang berkualitas dan berdedikasi
3. Mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
4. Tersusunnya rencana pembangunan yang efektif yang mantap dan aspiratif
5. Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai acuan penyusunan perencanaan tahun berikutnya
6. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan penelitian yang aplikatif
7. Terlaksananya kegiatan lintas sector secara tertib dan terpadu

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas, maka tujuan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Pitu Riawa adalah mengembangkan sistim administrasi pelayanan public yang efisien dan efektif, transparan, akuntabel dan professional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai “ **good governance** ” untuk meningkatkan fungsi pelayanan aparatur kecamatan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah Kecamatan Pitu Riawa adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur kecamatan ( Wawasan, intelektual, komitmen pelaksanaan tupoksi ) melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi setiap seksi.

2. Mendesain sistim pengelolaan administrasi yang efisien guna menunjang dan mewujudkan sistem pelayanan yang prima.

## 2. Tujuan dan Indikator Kinerja

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel. 2. 1** Tujuan dan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Pitu Riawa

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Komunikasi,air dan listrik	Bulan	12	60
	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Unit	1	5
	Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	26	130
	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	60
	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	60
	Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Bulan	12	60
	Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Bulan	12	60
	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Bulan	12	60
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Unit	1	5
	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	2	5
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Unit	5	5
	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	5	5
	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Aparatur	Bulan	12	60
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Lap	8	10

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Yang Memadai Melalui Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Keg	7	35
---	--	-----	---	----

### 3. Sasaran dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2** Sasaran dan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Pitu Riawa

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Pelayan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Komunikasi,air dan listrik	Bulan	12	60
	Tersedianya Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Unit	1	5
	Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	26	130
	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	60
	Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Bulan	12	60
	Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Bulan	12	60
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administasi	Bulan	12	60
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Unit	1	5
	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	2	5
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Unit	5	5
	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	5	5
	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Aparatur	Bulan	12	60
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Yang Memadai Melalui Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Keg	2	2

#### 4. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2015 sebagai berikut:

**Tabel 2.3** Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan listrik
	Tersedianya Premi Asuransi Barang Milik Daerah
	Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor
	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
	Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
	Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
	Meningkatnya Kinerja Organisasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Organisasi
	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
	Terpeliharanya Gedung Kantor
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Aparatur
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terciptanya Kesehatan Masyarakat

#### B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2015 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2015, IKU dan APBD. Kantor Kecamatan Pitu Riawa telah menetapkan PK sebagai berikut:

**Tabel 2.4** Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Pitu Riawa Tahun 2018

C.

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Komunikasi,air dan listrik	Bulan	12
	Tersedianya Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Unit	1
	Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	26
	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12
	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12
	Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Bulan	12
	Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Bulan	12
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	Bulan	12
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Unit
Terpeliharanya Gedung Kantor		Unit	2
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional		Unit	26
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor		Unit	5
Lancarnya Pelaksanaan Tugas Aparatur		Unit	8
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terciptanya Kesehatan Masyarakat	Keg	2

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Kantor Kecamatan Pitu Riawa telah menetapkan IKU sebagai berikut :

**Tabel 2.5** IKU Kantor Kecamatan Pitu Riawa

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Komunikasi,air dan listrik	14.400.000	68.3	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
	Tersedianya Premi Asuransi Barang Milik Daerah	5.081.500	100	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.250.000	38.1	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	46.206.000	76.7	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.980.000	100	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
	Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	28.169.000	96.2	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
	Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10.880.000	94.1	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	243.377.700	80.6	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Terpeliharanya Gedung Kantor	7.788.000	100	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	46.938.800	78.7	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tersedianya Stimulan Pembangunan Desa	278.603.000	0	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan

#### D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kecamatan Pitu Riawa maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp 3.018.414.000,-** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.:

**Tabel 2.6** Rencana Belanja Kantor Kecamatan Pitu Riawa Tahun 2018

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	<b>2.234.333.000</b>	
2	Belanja Langsung	<b>784.081.000</b>	
<b>Jumlah</b>		<b>3.018.414.000</b>	

Sasaran stratejik tahun 2018, indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan pada tabel berikut:

NO	SASARAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100
		- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Unit	1
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	1
		- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12
		- Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	%	100
		- Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	%	90
		- Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100
2.	<b>PROGRAM SARANA DAN PRASARANA</b>	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	%	90
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	1

3.	<b>PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	- Belanja Pegawai	%	90
		-		

Sedangkang draf penetapan Kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut

U R A I A N	J U M L A H ( R p )
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.245.701.000,-</b>
- Gaji dan Tunjangan	2.124.053.900,-
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	121.647.100,-
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.250.074.000,-</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>437.767.00,-</b>
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik * <i>Belanja Listrik</i>	16.800.000,- 16.800.000,-
- Penyediaan jasa jaminan barang milik Daerah * <i>Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah</i>	5.100.000,- 5.100.000,-
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional	2.275.000,-
- Penyediaan jasa administrasi keuangan	57.563.000,- ,-
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor * <i>Belanja alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batery Kering)</i>	2.934.000,- 2.934.000,-
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah * <i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</i>	61.762.000,- 61.762.000,-
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah * <i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</i>	24.160.000,- 24.160.000,-
- Pelayanan Administrasi Perkantoran	267.173.000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>72.031.000,-</b>
- Pengadaan peralatan gedung kantor	17.100.000,-
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.788.000,-
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional * <i>Belanja Jasa Service</i> * <i>Belanja Pengadaan Suku Cadang</i> * <i>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas</i>	46.143.000,- ,- ,- ,-

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.000.000,-
<b>Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>740.276.000,-</b>
- Belanja Pegawai	,-
• <i>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</i>	,-
- Belanja Barang dan Jasa	,-
• <i>Belanja Alat Tulis Kantor</i>	,-
• <i>Belanja Jasa Transportasi</i>	,-
• <i>Belanja Penggandaan</i>	,-
• <i>Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan</i>	,-
• <i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</i>	,-
• <i>Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat</i>	,-
• <i>Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Tenaga Ahli</i>	,-
<b>J U M L A H</b>	<b>,-</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Kantor Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018.

#### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Kantor Camat Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Pencapaian kinerja IKU Kantor Camat Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terbayarnya Tagihan Telp, Listrik dan Air	Bulan	12	12	68.3
2.	Terbayarnya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Unit	1	1	100.0
3.	Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	2	1	38,1
4.	Tertibnya pelaksanaan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	76.7
5.	Tersedianya Jasa komponen Intalsilistrik/penerangan bangunan Kantor	Bulan	12	12	100
6.	Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bulan	12	12	96.2
7.	Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Bulan	12	12	94.1

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
8.	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Bulan	12	12	<b>80.6</b>
9.	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	3	3	<b>100</b>
10.	Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Oprasional	Unit	2	1	<b>78.7</b>
11.	Tersedianya Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Unit	2	0	<b>0</b>

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 sebanyak indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 3.1** Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Memuaskan	SM
2.	76 < 90	Memuaskan	M
3.	66 < 75	Cukup Memuaskan	CM
4.	51 < 65	Kurang Memuaskan	KM
5.	< 50	Tidak Memuaskan	TM

Dari 11 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 28 persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, 14 persen telah memenuhi kriteria memuaskan, 21 persen telah memenuhi kriteria cukup memuaskan, 21 persen telah memenuhi kriteria kurang memuaskan, dan 7 persen dengan kriteria tidak memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU OPD Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

## 2. Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum OPD Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2018 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Sasaran

#### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja

Kantor Kecamatan Pitu Riawa untuk tahun 2018 Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1. Terbayarnya Tagihan Telp, Listrik dan Air	Bulan	12	12	<b>68.3</b>
	2. Terbayarnya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Unit	1	1	<b>100.0</b>
	3. Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	2	1	<b>38,1</b>
	4. Tertibnya pelaksanaan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	<b>76.7</b>
	5. Tersedianya Jasa komponen Intalsilistik/penerangan bangunan Kantor	Bulan	12	12	<b>100</b>
	6. Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bulan	12	12	<b>96.2</b>
	7. Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Bulan	12	12	<b>94.1</b>
	8. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	10	<b>80.6</b>
	9. Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	3	3	<b>100</b>
	10. Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oprasional	Unit	2	1	<b>78.7</b>
Peningkatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangu Desa	11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Keg	7	0	0
<b>Rata-rata capaian</b>					
%					<b>75,7</b>

Dari 11 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 3 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 8 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran ini telah berhasil Mencapai target yaitu dengan capaian Persen

b. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian (%)			
		2015	2016	2017	2018
1.	Terbayarnya Tagihan Telpn, Listrik dan Air	72,24	64,79	57,13	68,3
2.	Terbayarnya Premi Asuransi Barang Milik Daerah	100	92,34	96,61	100
3.	Terbayarnya pajak Kendaraan Bermotor	76,05	54,68	77,2	38,1
4.	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100	99,68	99,8	76,7
5.	Berjalannya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	99,26	97,92	94,6	96,2
6.	Berjalannya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	99,42	37,62	54,8	94,1
7.	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,33	91,69	78,46	80,6
8.	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	0	44,11	57,14	
9.	Terpeliharanya Gedung Kantor	100	94,79	100	100
10.	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	92,28	94,79	76,12	76,12
11.	Terciptanya laporan capaian Kinerja ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	94,21	-	-	-
12.	Tercapainya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-	-	-	
13.	Tersedianya Intensifikasi dan Ektensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	100	-	-	-
14.	Tercapainya Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dalam membangun	-	75,64	-	-
15.	Terciptanya Peningkatan Kerjasama dengan Pemerintah Kecamatan	-	-	-	-
16.	Tersedianya Belanja Modal	100	0	-	-
17.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	50,77	-	75,64	0
<b>Rata-rata capaian</b>		<b>1.180,26</b>	<b>848,05</b>	<b>867,5</b>	<b>832,7</b>
<b>%</b>		<b>84,30</b>	<b>70,67</b>	<b>78,86</b>	<b>75,7</b>

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 78,86 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi \_\_\_ persen pada tahun 2018 atau mengalami peningkatan sebesar \_\_\_ persen.

**a. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Terbayarnya Tagihan Telp, Listrik dan Air	Bulan	60	60	100
2.	Terbayarnya Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Unit	1	1	100
3	Terbayarnya pajak Kendaraan Bermotor	Unit	5	5	100
4.	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Bulan	60	60	100
5.	Berjalannya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bulan	60	60	100
6	Berjalannya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Bulan	60	60	100
7.	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	60	60	100
8.	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Unit// Buah	7	9	128,5
9.	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	5	5	100
10	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Bulan	5	1	20
11	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Unit	5	5	100
12	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	5	5	100
13	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Keg	10	10	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Kecamatan Pitu Riawa, maka terdapat 3 indikator yang telah mencapai target jangka menengah dan 2 indikator yang belum mencapai target jangka menengah namun kedua indikator yang belum mencapai target tersebut dioptimalkan agar ditahun 2018 (tahun terakhir periode Renstra OPD/RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang target tersebut dapat dicapai.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

1) Analisis Keberhasilan

Kinerja Kantor Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 memperoleh predikat **Sangat berhasil** atau dengan capaian kinerja 95,70 % terutama disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a) Adanya efisiensi penggunaan dana, di mana target/realisasi kegiatan dapat dicapai dengan dana dan sumber daya lainnya yang lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan.
- b) Adanya dukungan SDM/Aparatur dengan kualitas yang relatif memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas yang diembannya.

2) Analisis Kelemahan

Realisasi kegiatan dan anggaran pada Kantor Kecamatan Pitu Riawa Tahun Anggaran 2018 tidak mencapai hasil maksimal disebabkan karena proses pencairan dana yang terlambat sehingga berpengaruh pada pencairan dana tahap-tahap selanjutnya. Ini juga diakibatkan oleh keterbatasan anggaran (Defisit) yang dialami oleh keuangan daerah.

3) Strategi Pemecahan Masalah

Untuk meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Pitu Riawa di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah penyempurnaan, antara lain :

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan karakteristik dan potensi sumber daya yang ada.
- b) Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana.
- c) Meningkatkan profesionalisme pengelola kegiatan, baik secara internal maupun eksternal;
- d) Meningkatkan upaya-upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
- e) Penyediaan data dan informasi kegiatan yang cukup dalam rangka penyempurnaan penetapan dan pengukuran indikator kinerja.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 Rp sebesar 2.671.000 dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Yakni Sebesar Rp 353.344.200 Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sebanyak Rp.54.726.800.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran

menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2** Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terbayarnya Tagihan Telp, Listrik dan Air	Bulan	12	<b>68,3</b>	14.400.00	9.841.404	<b>68,3</b>
2	Terbayarnya Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Unit	1	<b>100</b>	5.081.500	5.080.600	<b>100</b>
3	Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	2	<b>38,1</b>	2.250.000	858.090	<b>38,1</b>
4	Tertibnya pelaksanaan Administrasi Keuangan	Bulan	12	<b>76,7</b>	46.206.000	35.460.000	<b>76,7</b>
5	Tersedianya Jasa komponen Intalsilistrik/penerangan bangunan Kantor	Bulan	12	<b>100</b>	2.980.000	2.980.000	<b>100</b>
6	Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bulan	12	<b>96,2</b>	28.169.000	27.093.000	<b>96,2</b>
7	Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Bulan	12	<b>94,1</b>	10.880.000	10.240.000	<b>94,1</b>
8	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	<b>80,6</b>	243.377.700	196.122.150	<b>80,6</b>
9	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	3	<b>100</b>	7.788.000	7.788.000	<b>100</b>
10	Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Oprasional	Unit	2	<b>78,7</b>	46.938.800	36.933.500	<b>78,7</b>
11	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	7	7	<b>0</b>	278.603.000	0	<b>0</b>

### 1. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 16(Enam Belas) sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 10(Sepuluh) sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya Tagihan Telp, Listrik dan Air	100	<b>68,3</b>	68%
		Terbayarnya Premi Asuransi Barang Milik Daerah	100	<b>100</b>	100%
		Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor	100	<b>38,1</b>	38%
		Tertibnya pelaksanaan Administrasi Keuangan	100	<b>76,7</b>	77%
		Tersedianya Jasa komponen Intal sili listrik/penerangan bangunan Kantor	100	<b>100</b>	100%
		Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100	<b>96,2</b>	96%
		Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	100	<b>94,1</b>	94%
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	<b>80,6</b>	81%
2	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur				
		Terpeliharanya Gedung Kantor	100	<b>100</b>	100%
		Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional	100	<b>78,7</b>	79%
3	Peningkatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangu Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100	-	-

Evaluasi kinerja aparatur kecamatan Pitu Riawa keseluruhan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung hanya dapat dilakukan oleh Camat dan Sekcam dengan melihat apa-apa yang telah dilakukan dan dilaksanakan aparatur tersebut dan sejauh mana yang dicapai. Berikut dapat kami sebutkan bahwa - Target anggaran tahun 2018 sebesar Rp. **3.018.414.000-** dan Realisasi anggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp. **2.671.007.000,-**. (Berikut Uraianannya)

U R A I A N	J U M L A H ( Rp )	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
<b>BELANJA</b>	<b>2.671.007.000,-</b>	<b>2.268.139.822</b>	<b>402.867.178,-</b>	<b>84,9</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.984.333.000,-</b>	<b>1.935.743.078</b>	<b>48.589.922,-</b>	<b>97,6</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>686.674.000,-</b>	<b>332.396.744,-</b>	<b>354.277.256,-</b>	<b>48,4</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>353.344.200,-</b>	<b>287.675.244,-</b>	<b>65.668.956,-</b>	<b>81,4</b>
<b>Belanja Jasa Kantor</b>				
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.400.000,-	9.841.404	4.558.596,-	68,3
- Penyediaan jasa jaminan barang milik Daerah	5.081.500,-	5.080.600,-	900,-	100
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional	2.250.000,-	858.090,-	1.391.910,-	38,1
- Penyediaan jasa administrasi keuangan	46.206.000	35.460.000,-	10.746.000	76,7
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.980.000	2.980.000	0	100
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	28.169.000	27.093.000	1.076.000	96,2
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	10.880.000	10.240.000	640.000	94,1
- Pelayanan Adminisrtasi perkantoran	243.377.700	196.122.150	47.255.550	80,6
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>54.726.800,-</b>	<b>44.721.500,-</b>	<b>10.005.300,-</b>	<b>81,7</b>
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.788.000	7.788.000	0	100
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	46.938.800	36.933.500	10.005.300	78,7
<b>Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>278.603.000,-</b>	<b>0,-</b>	<b>278.603.000,-</b>	<b>0</b>
- <b>Belanja Pegawai</b>				
- <b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
<b>J U M L A H</b>	<b>2.671.007.000,-</b>	<b>2.268.139.822,</b>	<b>402.867.178,-</b>	<b>75,7</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan demikian uraian pada bab sebelumnya dapat kita mengambil suatu kesimpulan yang berhubungan dengan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Pitu Riawa di tahun 2018 sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok aparatur Kecamatan Pitu Riawa dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan kemampuan dan SDM yang ada dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada
2. Ukuran keberhasilan kinerja aparatur Kecamatan Pitu Riawa yang berdasar pada pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dapat dilihat dengan apa yang telah dilaksanakan dan sejauh mana kinerja dalam hal menindak lanjuti surat yang masuk
3. Pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan telah mencapai kinerja maksimal sebagaimana yang diharapkan
4. Dari sasaran yang telah dicapai tersebut, tentunya masih banyak permasalahan, hambatan/kendala yang dihadapi yang kesemuanya itu dapat diantisipasi untuk menjadi pelajaran di tahun 2018 terutama masalah kekurangannya tenaga staf

Semoga laporan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat.

Dongi, 2018

CAMAT

**Drs. MUSTARI KADIR, M.Si**  
Nip. 19680119 199101 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Kec. Pitu Riawa Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) SKPD Kec. Pitu Riawa Tahun 2018 merupakancapaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/dua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2014 - 2018 LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2014-2018).

LKj SKPD Kec. Pitu Riawa disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj SKPD Kec. Pitu Riawa Tahun 2015 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja SKPD Kec. Pitu Riawa. Komitmen dalam penyusunan LKj SKPD Kec. Pitu Riawa bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD Kec. Pitu Riawa untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj SKPD Kec. Pitu Riawa Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di SKPD Kec. Pitu Riawa Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama SKPD Kec. Pitu Riawa pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas SKPD Kec. Pitu Riawa Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari indikator kinerja utama, terdapat (*masukkan jumlah indikator*) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj SKPD Kec. Pitu Riawa Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Dongi 2018

Camat

**Drs. MUSTARIKADIR, M.Si**  
Nip. 19680119 199101 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Kantor Kecamatan Pitu Riawa melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kantor Camat Pitu Riawa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Kantor Camat Pitu Riawa untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Kantor Kecamatan Pitu Riawa tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Camat Pitu Riawa.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2015 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2018 yaitu, Sebanyak 10 Indikator Sedangkan 6(Enam) indikator kinerja sasaran yang lainnya realisasinya dibawah 100% yaitu Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kantor Camat Pitu Riawa ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kantor Camat Pitu Riawa di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Gambaran Umum Organisasi .....	3
1. Pembentukan Organisasi Pemerintah Kecamatan Pitu Riawa .....	3
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .....	3
D. Isu Strategi .....	4
E. Struktur Organisasi .....	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	5
A. Rencana Strategi .....	6
1. Rencana Strategi .....	6
2. Tujuan dan Indikator Kinerja .....	8
3. Sasaran dan Indikator Kinerja .....	9
4. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	11
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	12
2. Rencana Anggaran Tahun 2019 .....	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
1. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	16
2. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
3. Sasaran .....	17
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini .....	19
b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2014 -2018 .....	20
c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. ....	20
d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	20
B. Realisasi Anggaran .....	21
Analisa Efisiensi .....	22
BAB IV PENUTUP.....	25

## DAFTAR TABEL

	Hal
<b>Tabel 2.1</b> Tujuan dan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Pitu Riawa .....	8
<b>Tabel 2.2</b> Sasaran dan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Pitu Riawa .....	9
<b>Tabel 2.3</b> Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018 .....	10
<b>Tabel 2.4</b> Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Pitu Riawa Tahun 2018 .....	11
<b>Tabel 2.5</b> IKU Kantor Kecamatan Pitu Riawa .....	12
<b>Tabel 2.6</b> Rencana Belanja Kantor Kecamatan Pitu Riawa Tahun 2018.....	13
<b>Tabel 2.7</b> Sasaran stratejik, indikator kinerja dan target kinerja Tahun 2018 .....	13
<b>Tabel 2.8</b> Draf penetapan Kinerja tahun 2019 .....	14
<b>Tabel 3.1</b> Capaian Indikator Kinerja Utama .....	16
<b>Tabel 3.2</b> Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	17
<b>Tabel 3.3</b> Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini .....	18
<b>Tabel 3.4</b> Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2014 – 2018 .....	19
<b>Tabel 3.5</b> Perbandingan Kinerja tahun ini dan target jangka menengah .....	20
<b>Tabel 3.6</b> Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 .....	22
<b>Tabel 3.7</b> Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	23